

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT) DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

Rapat ke : 7 (tujuh)
Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI / ke-2
Dengan : Menteri Komunikasi dan Informatika RI
Hari, Tanggal : Selasa, 27 Januari 2015
Pukul : 14.30 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Tantowi Yahya
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : 1. Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informasi;
2. Kebijakan Anggaran Komunikasi dan Informasi;
3. Program Legislasi di Bidang Kominfo Tahun 2015-2019;
4. Kebijakan Pengelolaan dana USO.
5. Pembahasan RKA-KL APBNP/Kemenkominfo TA 2015
Hadir : 1. orang dari 50 Anggota Komisi I DPR RI
2. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

- 1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 13.35 WIB dan dinyatakan Tertutup Untuk Umum.
- 2 Rapat Kerja Komisi I DPR RI pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi I DPR RI mengapresiasi penjelasan Menkominfo tentang Kebijakan dan Rencana Kerja Kemenkominfo Tahun 2015-2019. Berkaitan dengan itu, Komisi I DPR RI akan melakukan pembahasan lanjutan mengenai:
 - a. RKA/KL APBN-P Kemenkominfo TA 2015
 - b. Rencana Pita Lebar Indonesia
2. Berkenaan dengan Program *Universal Service Obligation* (USO), Komisi I DPR RI akan membentuk Panja USO untuk membahas bersama Kemenkominfo mengenai Grand Desain Pemanfaatan Dana USO dan membahas anggaran PLIK/MPLIK yang statusnya belum dapat dicairkan (terblokir).
3. Terkait dengan fungsi legislasi, Komisi I DPR RI akan mengajukan RUU tentang Penyiaran dan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI) sebagai prioritas Prolegnas Tahun 2015 dan Kemenkominfo akan mengajukan RUU Revisi Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dan RUU Perlindungan Data Pribadi. Komisi I DPR RI dan Kemenkominfo juga bersepakat untuk melakukan revisi (terbatas) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diusulkan menjadi inisiatif Pemerintah.
4. Menindaklanjuti Program Digitalisasi Penyiaran, Kemenkominfo akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Komisi I DPR RI untuk pemantapan substansi regulasi dan selanjutnya akan menjadi substansi regulasi dalam RUU tentang Penyiaran.
5. Komisi I DPR RI mendukung Kemenkominfo untuk menguatkan Program Edukasi Publik tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Literasi, yang dalam pelaksanaannya akan bersinergi dengan Komisi I DPR RI untuk meningkatkan Ketahanan Nasional. Komisi I DPR RI mendorong Kemenkominfo meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam melakukan sosialisasi program-program Pemerintah.
6. Untuk memperkuat kontrol negara terhadap pengelolaan sektor telekomunikasi, Komisi I DPR RI bersama Kemenkominfo akan melakukan kajian tentang Sistem Audit dan Pendapatan Negara yang berasal dari Operator Telekomunikasi
7. Komisi I DPR RI meminta Kemenkominfo untuk membuat Sistem Keamanan Siber Nasional (*National Cyber Security*) sehingga Negara Republik Indonesia mampu mengantisipasi berbagai kejahatan/perang Siber yang berpotensi mengancam sistem keamanan Siber Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI meminta Kemenkominfo berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Lembaga Sandi Negara, Badan Intelijen Negara serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya, serta menyiapkan ruu tentang keamanan siber nasional ke dalam Prolegnas 2015-2019.

8. Komisi I DPR RI meminta Kemenkominfo untuk mempelajari peluang Addendum *Soft Loan* Projek *Improvement on TV Transmitting Stations* (ITTS-II) dari spesifikasi *ready to digital* menjadi full digital dan akan membahasnya bersama Komisi I DPR RI dan LPP TVRI.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 22.00 WIB

Jakarta, 27 Januari 2015
KETUA RAPAT,

TANTOWI YAHYA
A-252

CATATAN

- Terkait monitoring terhadap Konten Internet dengan Metode DNS, Kemenkominfo akan menyelesaikannya dalam waktu tiga bulan.